



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

# Rencana Strategis

(Renstra)

Tahun 2025 - 2029



Sekretariat  
**DPRD Provinsi  
Sumatera Barat**  
*Kota Padang | 2025*



## **KATA PENGANTAR**

Rencana Strategis (Renstra) merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Provinsi berupa RPJMD maupun pada tingkat pusat. Berdasarkan reviu internal terhadap Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi periode sebelumnya, diperoleh data bahwa penyusunan Rencana Strategis tahun 2025-2029 banyak dipengaruhi oleh aturan-aturan terbaru terkait dengan perencanaan pembangunan dan program kerja. Oleh sebab itu perbaikan-perbaikan yang dilaksanakan dalam penyusunan renstra ini lebih banyak penyesuaian terhadap aturan-aturan terkait perencanaan dan kinerja organisasi perangkat daerah.

Renstra ini berisikan tentang gambaran pelayanan Organisasi Perangkat Daerah dan isu-isu strategis berdasarkan tupoksi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Renstra 2015-2029 ini merupakan proses pembangunan 5 tahunan yang tidak terlepas dari proses pembangunan pada urusan pada tahun-tahun sebelumnya sehingga secara keseluruhan berisikan program dan kegiatan lanjutan.

Penyusunan Renstra didasarkan kepada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.
2. Reviu terhadap Renstra Sekretariat DPRD pada periode sebelumnya
3. Cascading Kinerja Sekretariat DPRD sebagai salah satu hasil review internal.
4. Serta Dokumen pendukung lainnya.

Dengan disusunnya dokumen dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 ini, diharapkan mampu menjadikan proses pembangunan di Provinsi Sumatera Barat lebih terarah.

Padang, Mei 2025

**Pt. SEKRETARIS DPRD  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



**Drs. MAIFRIZON, M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19680513 199512 1 005

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Tabel</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
<b>BAB II     GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN             ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	<b>13</b>
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis	30
<b>BAB III    TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH             KEBIJAKAN</b>	<b>37</b>
3.1 Tujuan Renstra PD 2025-2029	37
3.2 Sasaran Renstra PD 2025-2029	37
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	38
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	41
<b>BAB IV     PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN             KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>43</b>
<b>BAB V      PENUTUP</b>	<b>71</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	19
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Golongan	19
Tabel 2.3 Data Aset Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat	21
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024	26
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat	28
Tabel 2.6 Pemetaan Masalah	30
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2030	38
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Sekretariat DPRD	42
Tabel 4.1 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat	49
Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD	57
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	66
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat	69
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat	69

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan Pembangunan daerah ini mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Nomor 4421), serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib membuat dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD).

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri di atas, terdapat prosedur penetapan Rencana Strategis, dimana langkah awal yang dilaksanakan adalah penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis, kemudian dilanjutkan dengan penyempurnaan Rancangan Awal menjadi Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah setelah tersusunnya

perbaikan Rancangan Awal RPJMD Provinsi dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari Menteri Dalam Negeri. Rancangan Rencana Strategis kemudian dibahas dalam Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dan disampaikan lagi ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah setelah disempurnakan untuk pertama kali. Penyempurnaan tersebut akan menghasilkan Rancangan akhir Rencana Strategis yang nantinya akan ditetapkan sebagai Renstra OPD dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah setelah dilaksanakan verifikasi dan validasi oleh tim Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan sebagai unit pendukung (*supporting unit*). Sebagai unit pendukung, Sekretariat DPRD bertugas dalam penyelenggaraan administrasi keuangan, fasilitator pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Selain itu Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat juga berperan sebagai Koordinator yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 202 ayat (2) disampaikan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD Provinsi yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan gubernur atas persetujuan Pimpinan DPRD Provinsi setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi. Lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi dipimpin oleh Sekretaris DPRD Provinsi yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD provinsi dan secara administratif bertanggungjawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi. Dengan demikian Sekretariat DPRD mempunyai kewajiban menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seluruh entitas tersebut disusun secara spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan tujuan yang hendak dicapai.

Secara umum rencana strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 merupakan suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan tentang tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD selama tahun 2025-2029 serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029.

RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. RTRW Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2012 yang memuat strategi dan kebijakan penataan ruang wilayah yang meliputi: tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang, kelembagaan dan peran masyarakat.

RPJMD Provinsi Sumatera Barat akan dijabarkan di dalam dokumen RKPD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD. Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029 merupakan bagian integral dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029 yang pelaksanaannya akan dijabarkan di dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD setiap tahun mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJM Nasional. Renstra

Sekretariat DPRD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, program dan kegiatan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang nantinya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran daerah.

Langkah-langkah penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan pembentukan tim penyusun, pengumpulan informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan visi-misi-tujuan sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan *Focus Group Discussion* antar bidang pembangunan, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Gubernur Provinsi Sumatera Barat serta penetapan oleh Sekretaris DPRD untuk dapat dilaksanakan.

Setelah ditetapkannya Rencana Strategi, Organisasi Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja. Rencana Kerja disusun setiap tahun dengan mentelaah setiap capaian yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis. Renja OPD menjadi acuan untuk penyusunan RKA-OPD (Rencana Kerja Anggaran OPD). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan *output/outcome*. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. *Critical point*-nya adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan *output/outcome*.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, terdapat banyak landasan hukum yang digunakan sebagai payung hukum dan batasan-batasan penyusunan. Adapun

landasan hukum penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (lembaran negara tahun 2000 nomor 210, tambahan lembaran negara nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (lembaran negara tahun 2001 nomor 90, tambahan lembaran negara nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Administrasi dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
14. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (lembaran negara tahun 2005 nomor 150, tambahan lembaran negara nomor 4614);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran negara tahun 2006 nomor 25, tambahan lembaran negara nomor 4614);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran negara tahun 2005 nomor 165, tambahan lembaran daerah nomor 4593);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
  22. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun

- 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
  30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
  31. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

32. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025–2029 ditetapkan dengan maksud memberikan arahan dan sekaligus menjadi acuan bagi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dalam lima tahun ke depan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 2025-2029.
2. Menjaga konsistensi dari dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun.
3. Memberikan gambaran rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk lima tahun ke depan.
4. Menetapkan indikator program/kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan kegiatan.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.
6. Menjadi pedoman dalam meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah,serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

#### a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

d. Kelompok Sasaran Layanan

Bagian ini berisi tentang siapa kelompok sasaran atau penerima manfaat atas program-program yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

b. Isu Strategis

Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAHAN KEBIJAKAN**

3.1. Tujuan Renstra PD 2025-2029

Pada bagian ini dikemukakan rumusan Pernyataan tujuan jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya.

3.2. Sasaran Renstra PD 2025-2029

Pada bagian ini dikemukakan rumusan Pernyataan Sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya.

3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dalam lima tahun mendatang, dan dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, dan dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

**BAB V PENUTUP**

Bagian penutup berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

##### a. Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat DPRD

Pada Tahun 2023<sup>2</sup> ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dimana disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Provinsi. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan organisasi Sekretariat DPRD beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi adalah sebagai berikut:

#### 1. Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian

Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan meliputi program dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta rumah tangga. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- b. pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
- d. penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- e. pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- f. penyediaan fasilitasi fraksi DPRD;
- g. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- h. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- i. penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- j. penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- k. pelaksanaan evaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- l. pelaksanaan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- m. pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- n. penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- o. pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- p. pengoordinasian pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- q. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;

- r. pelaksanaan evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- s. pengkoordinasian dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- t. pelaksanaan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
- u. penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Umum dan Keuangan terdiri atas :

- 1) Subbagian Rumah Tangga; dan
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

## **2. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan**

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan meliputi kajian perundang-undangan, persidangan dan risalah serta Hubungan Masyarakat, protokol dan publikasi. Untuk melaksanakan tugasnya, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif;
- d. pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan pengumpulan bahan penyiapan draf Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif;
- f. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- g. pelaksanaan penyusunan risalah rapat;

- h. pengkoordinasian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- i. pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi Daftar Inventarisir Masalah;
- j. pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah rapat;
- k. penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- l. penyelenggaraan publikasi;
- m. penyelenggaraan keprotokolan;
- n. penyelenggaraan perpustakaan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

### **3. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan**

Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi fasilitas penganggaran, fasilitas pengawasan, serta kerjasama dan aspirasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan fasilitas, verifikasi, dan koordinasi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara/ Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- b. pelaksanaan fasilitas, verifikasi, dan koordinasi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan;
- c. pelaksanaan fasilitas, verifikasi, dan koordinasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. pelaksanaan fasilitas, verifikasi, dan koordinasi pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;

- e. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- f. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- g. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi aspirasi masyarakat;
- h. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- i. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- j. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- k. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- l. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- m. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut disajikan Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat:

**Gambar 2.1**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN**  
**PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**



**b. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Berdasarkan data kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Januari 2025, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 86 Pegawai, yang terdiri dari 58 Pegawai laki-laki (67%) dan 28 pegawai perempuan (33%). Selain itu juga terdapat pegawai yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (pegawai Non ASN) sebanyak 13 pegawai, yang terdiri dari 11 pegawai Non ASN laki-laki (85%) dan 2 pegawai Non ASN perempuan (15%). Sehingga jumlah total pegawai ASN dan Non ASN pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 99 pegawai. Jumlah dan komposisi pegawai ASN lebih rinci pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

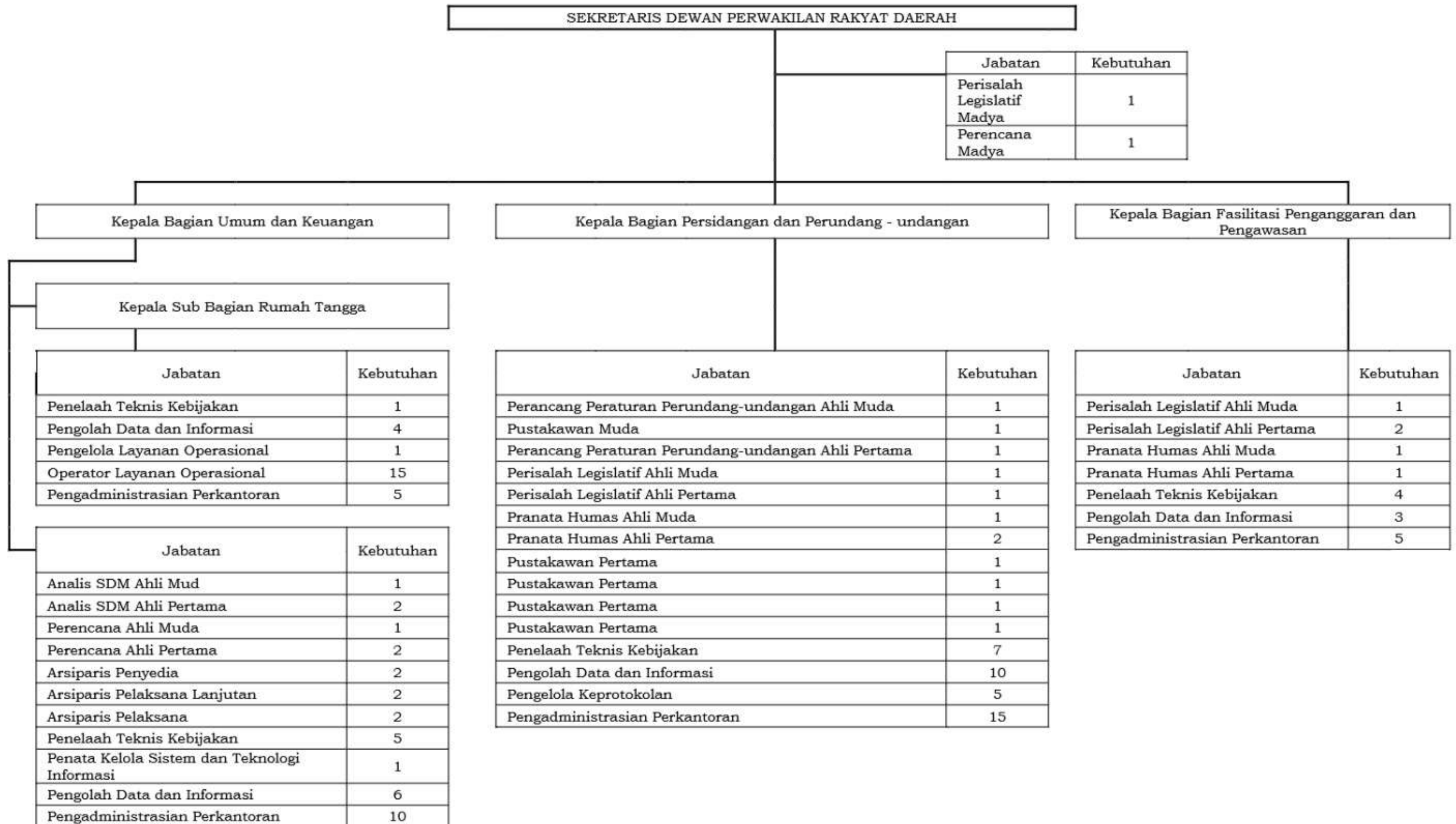
PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG	JENIS KELAMIN	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
S2	19	9	10
S1	38	26	12
D3	6	4	2
SMA	22	18	4
SMP	-	-	-
SD	1	1	
<b>JUMLAH</b>	<b>86</b>	<b>58</b>	<b>28</b>

Komposisi pegawai ASN menurut Golongan Ruang pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2 berikut:

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Golongan**

GOLONGAN	JUMLAH ORANG	JENIS KELAMIN	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
IV	9	3	6
III	62	43	19
II	14	11	3
I	1	1	
<b>JUMLAH</b>	<b>86</b>	<b>58</b>	<b>28</b>

Kebutuhan pegawai ASN Sekretariat DPRD menurut peta jabatan sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 060-532-2025 tanggal 27 Agustus 2025 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, seperti diagram di bawah ini



Untuk menjalankan operasional tugas pokok dan fungsi, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat difasilitasi sejumlah aset yang masih berfungsi secara baik. Rincian aset yang masih dipakai di Sekretariat DPRD Kota Mojokerto dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.3**  
**Data Aset Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat**

<b>No</b>	<b>Kategori/Jenis Barang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Kondisi</b>
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	1	baik
2	Tanah Bangunan Mes/Wisma/Asrama	1	baik
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	baik
4	Elevator/ Lift	1	baik
5	Exhause Fan	5	baik
6	Gandola	1	baik
7	Pompa Air	5	Baik
8	Electric Generating Set	8	baik
9	Pompa	8	Baik
10	Sedan	3	baik
11	Jeep	7	baik
12	Minibus	23	baik
13	Micro Bus (Penumpang 15 s/d 29 orang	5	baik
14	Bus (Penumpang 30 orang ke atas)	2	baik
15	Pick Up	2	baik
16	Sepeda Motor	23	baik
17	Scanner	25	baik
18	AC Sentral	2	baik
19	Alat Pendingin Lainnya	5	baik
20	AC Split	122	baik
21	AC Window	21	baik
22	AC Standing	5	baik
23	Timbangan	1	baik
24	Rak Besi	20	baik
25	Rak Kayu	4	baik

<b>No</b>	<b>Kategori/Jenis Barang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Kondisi</b>
26	Rak Piring Alumunium	1	baik
27	Rak Penyimpanan	1	baik
28	Mesin Fotocopy	2	baik
29	Lemari Besi dan Stainless Steel	36	baik
30	Lemari Buku	18	baik
31	Lemari Arsip Pejabat	270	baik
32	Lemari Kayu	38	baik
33	Filling Cabinet	76	baik
34	Brankas	5	baik
35	Alat Penghancur Kertas	19	baik
36	Mesin Fogging	1	baik
37	LCD Projector/ Infocus		
38	Papan Nama Instansi	2	baik
39	Papan Tulis	18	baik
40	Gardu dan Rumah Genset	1	baik
41	Billboard	2	baik
42	Baliho	1	baik
43	CCTV set	4	baik
44	Kulkas	28	baik
45	Alat Pendingin	70	baik
46	Meja Kerja (Kayu dan Besi)	372	baik
47	Meja Sidang	25	baik
48	Meja rapat	296	baik
49	Meja Makan	4	baik
50	Meja Rias	3	baik
51	Meja Tamu	12	baik
52	Tempat Tidur	24	baik
53	Kasur/ Spring Bed	5	baik
54	Kursi Rapat	748	baik
55	Kursi Kerja	281	baik

<b>No</b>	<b>Kategori/Jenis Barang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Kondisi</b>
56	Kursi Tamu	79	baik
57	Sofa/Kursi Ruang Tamu	51	baik
58	Vacum Cleaner	6	baik
59	Mesin Cuci	2	baik
60	Kompor Gas	3	baik
61	Kompor Listrik	1	baik
62	Tabung Gas	1	baik
63	Teko Listrik	14	baik
64	Coffe Maker	5	baik
65	Kitchen Set	1	baik
66	Televisi	144	baik
67	Amplifier	1	baik
68	Sound System Speaker/Meeting	16	baik
69	Compact Disc Player	2	baik
70	Electronic Conference/Mic Conference	58	baik
71	Kamera Recording	18	baik
72	Kamera Digital	5	baik
73	Handy Cam	3	baik
74	Tiang Bendera	28	baik
75	Tangga	5	baik
76	Dispenser	65	baik
77	Videotron	1	baik
78	Alat Pemadam kebakaran	10	baik
79	Hydrant+Slang +Nozel	2	baik
80	Water Heater	1	baik
81	Komputer PC	26	baik
82	Laptop	133	baik
83	Hard Disk	10	baik
84	Printer	61	baik
85	Infocus LCD	3	baik

<b>No</b>	<b>Kategori/Jenis Barang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Kondisi</b>
86	UPS	5	baik
87	Layar Proyektor	3	baik
88	Acces Point	6	baik
89	Telepon	6	baik
90	Handy Talkie	14	baik
91	Facsimili	3	baik
92	Smartphone	1	baik
93	Antena Parabola	2	baik
94	Thermometer	4	baik
95	Dumble Plastik	1	baik
96	Alat Fitness	37	baik
97	Alat Bilyard	1	baik
98	Meja Pimpong	2	baik
99	Meja Billiard	1	baik
100	Camera Stabilizer	2	baik
101	Bilik Antispetik	3	baik
102	Detektor Logam	6	baik
103	Alat Musik Lengkap	2	baik

Dilihat dari akumulasi aset pendukung kinerja Sekretariat DPRD terhadap kebutuhan pelayanan kinerja sudah dianggap memadai, namun dari sejumlah aset yang dimiliki apabila tidak didukung oleh pemeliharaan dan sumber daya manusia yang berkompeten tentu saja hal tersebut menjadi percuma, oleh sebab itu hal tersebut menjadi tantangan tersendiri oleh Sekretariat DPRD untuk selalu meningkat kompetensi Sumber Daya Manusia yang berdayaguna dan selalu siap untuk menggunakan sarana dan prasarana dalam beberapa kondisi tertentu.

Lokasi Kantor Sekretariat DPRD tergolong cukup strategis dan memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor Sekretariat DPRD. Halaman parkir terhampar luas sehingga memadai dalam melaksanakan rapat-rapat besar atau rapat dengan mengundang tamu dalam jumlah

banyak. Sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam kualitas dan kuantitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, printer, dll) dengan anggaran pemeliharaan yang juga cukup memadai, memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih mandiri dan terfokus.

**c. Kinerja Pelayanan**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi utama Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah memfasilitasi seluruh kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat (supporting), yang meliputi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024, ditetapkan sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu Meningkatnya pelayanan kepada Pemangku Kepentingan dengan indikator Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan.

Tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat berdasarkan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama tahun 2021-2024 tersebut, seperti dalam tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD**  
**Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra OPD tahun ke-				Realisasi Capaian tahun ke-				Rasio Capaian pada tahun ke-			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4-
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	A (80,01)	A (80,01)	A (80,01)	A (80,01)	BB (75,03)	BB (75,10)	BB (76,71)	BB (77,07)	93,77	93,86	95,88	96,33
2	Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan	Indeks kepuasan pelayanan kepada pemangku kepentingan	90	90	90	90	90,96	91,05	90,15	91,34	101,06	101,17	100,17	101,49

Berdasarkan Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat di atas, Sekretariat DPRD menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2024, yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dengan indikator yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, dengan target dari tahun 2021-2024 adalah A (80,01) dan terealisasi dari tahun 2021-2024 adalah BB
2. Meningkatnya pelayanan kepada Pemangku Kepentingan, dengan indikator yaitu Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan, dengan target dari tahun 2021-2024 adalah 90 atau SANGAT BAIK dan terealisasi dari tahun 2021-2024 adalah SANGAT BAIK untuk setiap tahunnya atau melebihi target.

Berdasarkan tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Renstra Tahun 2021-2024 di atas, menunjukkan bahwa pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terlaksana dengan cukup baik, meskipun masih diperlukan perbaikan-perbaikan dalam administrasi maupun pelaksanaannya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat antara lain ketersediaan anggaran, adanya koordinasi antar alat kelengkapan dewan yang meningkat, tersedianya fasilitas rapat antara lain ruang rapat dan ruang kerja yang representatif, materi rapat, risalah rapat dan fasilitasi kunjungan baik dari sisi keuangan, jadwal kunjungan dan kegiatan lainnya guna melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai wakil rakyat.

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat**

Uraian	Target Renstra OPD tahun ke-				Realisasi Capaian tahun ke-				Rasio capaian pada tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	55.003.000.000	87.056.390.543	71.449.263.900	71.218.931.920	80.797.988.035	112.244.036.317	109.550.622.876	123.094.148.644	146,90%	128,93%	153,33%	172,84%	10%	100%
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	72.027.000.000	67.528.983.325	41.754.913.100	37.898.965.300	46.776.920.945	77.057.179.992	91.709.774.733	71.637.121.365	64,94%	114,11%	219,64%	189,02%	-10%	100%

Melihat Tabel 2.5 terlihat beberapa kesenjangan rasio pencapaian target yang telah dilaksanakan. Rasio terbesar dalam penganggaran dan rasio ketercapaian anggaran berada dari pembenahan sumber daya manusia. Padahal telah disampaikan pada tahap permasalahan, akar masalah dalam pelaksanaan pelayanan adalah sumber daya manusia yang kurang mumpuni. Oleh sebab itu Sekretariat DPRD selalu berupaya melakukan perbaikan sumber daya manusia dengan beberapa tahapan yaitu dengan melaksanakan pelatihan berkala untuk pegawai tertentu sehingga mampu digunakan sesuai kebutuhan, kemudian alternatif lain apabila pegawai bersangkutan tidak mampu melaksanakan tugas yang telah diberikan sesuai dengan pertimbangan analisa jabatan maka pegawai bersangkutan akan dikembalikan kepada koordinator utama urusan kepegawaian seperti Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, atau Inspektorat Provinsi. Pada tabel tersebut juga diperoleh bahwa pencapaian terbaik terdapat pada tahun 2024 dimana target pelayanan tercapai dengan baik. Hal tersebut diperoleh dengan pematangan langkah-langkah teknis seperti penyusunan rencana tindak pengendalian, dan pemantauan terhadap rencana aksi.

#### **d. Kelompok Sasaran Layanan.**

Program-program yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan program yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana program beserta indikator program untuk masing-masing program ini sedekat mungkin didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Indikator program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk penrima manfaat atau kelompok sasaran (beneficiaries) tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan-kegiatan yang dipilih untuk setiap program, merupakan kegiatan yang menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Kelompok sasaran atau penerima manfaat atas program-program yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat secara langsung adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan masyarakat luas Provinsi Sumatera Barat.

## 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

### a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Secara terstruktur, lingkungan Strategis dimaksud berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu peluang (opportunity) dan ancaman/tantangan (threath).

**Tabel 2.6**  
**Pemetaan Masalah**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Dukungan dan Fasilitasi DPRD Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1. Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan	1. Masih rendahnya pemahaman aparatur Sekretariat DPRD tentang tugas pokok dan fungsinya. 2. Kurangnya kompetensi aparatur Sekretariat DPRD dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan yang sering berubah-ubah. 3. Kurangnya tenaga administrasi dalam penyelenggaraan administrasi.
	2. Belum optimalnya dukungan layanan dan fasilitasi dalam	1. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan oleh anggota DPRD. 2. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

	pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	3. Penyusunan, pembahasan dan pengkajian Raperda Inisiatif Legislatif/Eksekutif, Peraturan DPRD dan Keputusan belum diselesaikan tepat waktu 4. Pengawasan pelaksanaan jalannya fungsi pemerintah daerah yang belum teragendakan dengan baik.
--	-----------------------------------	--

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan unsur sekretariat DPRD adalah belum optimalnya pelayanan kepada pemangku kepentingan dalam hal ini pelayanan untuk anggota DPRD dan masyarakat. Pelayanan terhadap anggota DPRD yang belum optimal terutama mencakup ketepatan dan kecepatan dalam penyiapan rapat-rapat, seperti rapat internal komisi, rapat lainnya (selain persidangan), penyampaian masukan aspirasi dari Perangkat Daerah kepada anggota DPRD serta belum optimalnya pelayanan staf terhadap penyelesaian administrasi pertanggungjawaban keuangan. Hal ini dipengaruhi oleh masih terbatasnya kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya, rendahnya tingkat kedisiplinan ASN Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan pekerjaan, serta belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana terutama sarana teknologi informasi yang tersedia, sehingga penyampaian aspirasi kepada anggota DPRD sering terlambat.

Disamping permasalahan utama tersebut, terdapat beberapa permasalahan lain yaitu belum optimalnya kualitas dan kuantitas koordinasi, integrasi, fasilitasi dan sinkronisasi tugas serta fungsi DPRD dengan lembaga pemerintah daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan termasuk LSM. Dalam hal ini, Sekretariat DPRD sebagai jembatan yang menghubungkan anggota DPRD dengan lembaga pemerintah daerah termasuk Perangkat Daerah serta lembaga sosial kemasyarakatan harus lebih cepat tanggap sehingga tidak terjadi miskomunikasi yang menghambat kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD terutama dalam mengimplementasikan pokok-pokok pikiran DPRD.

## b. Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan review terhadap faktor-faktor yang terkait dengan permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, maka isu strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 bisa diidentifikasi sebagai berikut :

### 1. Isu Strategis Global

- a. Kebijakan Ekonomi Global akibat Proteksionisme Kebijakan Amerika Serikat (AS).

Sekretariat DPRD dapat berperan dalam mendukung upaya memperkuat ketahanan perekonomian Nasional melalui kebijakan dan program yang relevan, misalnya dengan mendorong sinergi antara lembaga legislatif, eksekutif (pemerintah daerah), sektor swasta, perbankan, dan komunitas untuk mendukung UMKM, mendukung dan mengoptimalkan fungsi paguyuban untuk bersinergi dengan Pusat Layanan Usaha Terpadu, termasuk mendorong adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mewajibkan pasar modern menjual 20% produk lokal UMKM.

### 2. Isu Nasional

- a. Kebijakan Ekonomi Nasional dan Proteksionisme Ekonomi Global.  
DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dapat berkontribusi pada kebijakan ekonomi nasional dan isu proteksionisme global melalui **pengawasan dan legislasi** yang mendukung industri dalam negeri, serta **mengadvokasi kepentingan daerah** dalam perundingan perdagangan internasional.

b. Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara.

Upaya DPRD dalam mengambil kebijakan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara dilakukan melalui fungsi legislasi (membentuk perda), fungsi anggaran (menyusun dan menyetujui APBD), dan fungsi pengawasan (mengawasi pelaksanaan anggaran), yang kesemuanya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kesejahteraan rakyat. DPRD juga melibatkan aspirasi masyarakat dalam proses ini dan harus memiliki pengetahuan memadai tentang keuangan negara untuk melakukan pengawasan yang efektif.

c. Danantara sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi.

Peranan DPRD dalam Danantara sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi adalah sebagai **lembaga pengawas yang memastikan Danantara bekerja optimal untuk mengelola investasi dan aset negara guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional**. DPRD, melalui Komisi VI dan XI, bertugas mengawasi kinerja Danantara dalam mengoptimalkan aset negara, mengelola investasi strategis, serta mendorong hilirisasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga Danantara dapat berfungsi sebagai lokomotif ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Sekretariat bertugas dalam memfasilitasi pengawasan DPRD.

d. Koperasi Desa Merah – Putih.

Peranan DPRD dalam Koperasi Desa Merah Putih meliputi dukungan penuh dan pengawalan program, memastikan adanya koordinasi yang baik dengan dinas terkait, serta melakukan pengawasan terhadap implementasi dan keberhasilan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi rakyat. Anggota DPRD dapat meminta penjelasan dari dinas koperasi, memberikan apresiasi atas kemajuan, dan menekankan pentingnya sinergi antarlembaga untuk mengawal jalannya program. Tugas Sekretariat memfasilitasi rapat bersama mitra.

### 3. Isu Regional/ Daerah

Sumatera Barat merupakan bagian terintegrasi dari perekonomian di Pulau Sumatera. Perekonomian Provinsi Sumatera Barat jika dibandingkan dengan perekonomian skala regional Sumatera dalam 1 dekade terakhir memperlihatkan posisi berada pada papan tengah. PDRB Perkapita Harga Konstan Sumatera Barat berada pada peringkat 4 terbawah dari 11 provinsi yang ada di Sumatera dan di atas Bengkulu, Aceh dan Lampung. Untuk provinsi yang dikategorikan kaya di Sumatera adalah Kepulauan Riau dan Riau. Selanjutnya, Berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir di Sumatera Barat memperlihatkan perkembangan yang biasa saja yang tidak menonjol dibandingkan dengan provinsi lainnya di Sumatera. Tingkat pengangguran di Sumatera Barat tergolong tinggi dalam 1 dasawarsa terakhir berada pada posisi kedua tertinggi setelah Kepulauan Riau. Di samping itu persentase pekerja formal yang ada di Sumatera Barat berdasarkan perhitungan yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) berada pada peringkat ke 3 terakhir di atas Bengkulu dan Provinsi Lampung. Di samping itu, permasalahan industrialisasi di Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2000 memperlihatkan keadaan yang memprihatinkan dimana terjadi de-industrialisasi yang bersifat prematur yang makin lama proporsinya dalam PDRB semakin mengecil. Catatan sementara yang dapat dijelaskan bahwa Provinsi Sumatera Barat saat ini menghadapi kondisi dengan pendapatan perkapita yang rendah, dengan pertumbuhan ekonomi yang biasa-biasa saja, namun memiliki pengangguran yang tinggi serta proporsi tenaga kerja formal yang rendah dan terjadinya de-industrialisasi yang prematur dengan keadaan semakin rendah. Namun dalam permasalahan demikian. Provinsi Sumatera Barat adalah provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin yang rendah pada peringkat ketiga terendah di Sumatera di atas Kepulauan Riau dan Bangka Belitung.

#### 4. Isu Perangkat Daerah

a. Optimalisasi Pelayanan Perangkat Daerah.

Sekretariat DPRD dapat berperan dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan perangkat daerah, misalnya melalui dukungan administrasi, logistik, dan koordinasi.

b. Sinkronisasi dengan RPJMD.

Renstra Sekretariat DPRD harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah lainnya. Ini melibatkan pemetaan isu-isu strategis, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang relevan

c. Penguatan Kelembagaan.

Sekretariat DPRD dapat berperan dalam menguatkan kelembagaan perangkat daerah melalui pengembangan SDM, peningkatan kualitas sarana prasarana, serta peningkatan koordinasi antar lembaga. Selain itu salah satu penguatan kelembagaan di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan melakukan perubahan struktur organisasi yaitu dari Tipe B menjadi Tipe A, dan juga pemenuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan sesuai usulan analisis jabatan (anjab).

d. Peningkatan Kompetensi SDM.

Sekretariat DPRD dapat mendukung peningkatan kompetensi SDM perangkat daerah melalui pelatihan, pengembangan karir, dan pemberian insentif.

e. Optimalisasi Pemetaan Isu dan Rumusan Permasalahan.

Sekretariat DPRD perlu melakukan pemetaan isu strategis dan rumusan permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah. Hal ini akan membantu dalam merumuskan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang lebih tepat

f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi.

Sekretariat DPRD dapat berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan, sehingga mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Namun saat ini

Sekretariat DPRD sangat membutuhkan tenaga administrasi perkantoran, agar kualitas pelayanan administrasi menjadi optimal.

g. Peningkatan Kualitas Koordinasi.

Sekretariat DPRD dapat berperan dalam meningkatkan kualitas koordinasi antara DPRD dengan perangkat daerah lainnya, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM).

h. Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Sekretariat DPRD dapat mendukung optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perangkat daerah, misalnya melalui pengembangan sistem informasi manajemen (SIM).

i. Pengawasan dan Evaluasi.

Sekretariat DPRD dapat berperan dalam pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta terhadap penggunaan anggaran yang dialokasikan

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1. Tujuan Renstra PD 2025-2029**

Tujuan Perangkat Daerah adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan merespon isu strategis daerah yang dihadapi. Perumusan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat mengacu pada tujuan dan sasaran provinsi sesuai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, dimana Sekretariat DPRD berperan dalam mewujudkan visi “Sumatera Barat Madani Yang Maju Dan Berkeadilan” pada misi ke-8 “Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik Yang Efektif” dengan tujuan “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Tranparan, dan Pelayanan Publik Yang Efektif”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan jangka menengah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 adalah “Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD” dengan Indikator Kinerja “Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD”

#### **3.2. Sasaran Renstra PD 2025-2029**

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Adapun sasaran yang hendak dicapai oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah “Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD” Ik “Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD”

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Renstra Sekretariat DPRD**  
**Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2030**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke-					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Kinerja Keuangan Daerah	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	80,01	80,05	80,10	80,15	80,18	80,20
	Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	91,34	91,35	91,36	91,37	91,38	91,40

### 3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi adalah suatu cara untuk mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, strategi dimaksud merupakan pemilihan dan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam mengimplementasikan perencanaan strategi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun rencana strategi yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi dan sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi, integrasi, sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga pemerintahan daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya termasuk LSM. Sekretariat DPRD bertanggungjawab melayani tugas dan fungsi DPRD dengan tujuan agar Lembaga DPRD bisa melaksanakan tugas dengan maksimal. Secara tidak langsung dalam melaksanakan tugas, DPRD akan beririsan dengan komponen pemerintahan dan masyarakat. Terhadap komponen pemerintahan DPRD Provinsi Sumatera Barat akan bermitra dengan OPD terkait sesuai dengan bidang-bidang komisi

yang telah ditetapkan. Kemudian Lembaga kemasyarakatan, DPRD akan beririsan dengan kelompok masyarakat ataupun organisasi masyarakat. Dengan demikian hal tersebut akan menjadi bagian tugas oleh Sekretariat DPRD sebagai media informasi dan hubungan dengan masyarakat. Oleh sebab itu dibutuhkan koordinasi dan integrasi yang jelas antara DPRD dengan Organisasi Pemerintahan ataupun Organisasi Kemasyarakatan.

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD

Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan berhubungan langsung dengan kenyamanan anggota DPRD dalam melaksanakan aktivitas kedewanan. Termasuk di dalamnya administrasi rapat-rapat, perjalanan dinas dan administrasi keuangan. Dengan ditingkatkannya kualitas pelayanan ini, diharapkan bisa memberikan kenyamanan kepada anggota DPRD dalam menjalankan aktivitas kedewanan.

3. Meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD merupakan tugas pokok Sekretariat DPRD. Hal tersebut tertuang di dalam Permendagri nomor 90 tahun 2019 yang dimasukkan ke dalam Program Sekretariat DPRD.

4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja yang diperlukan.

Kualitas sarana dan prasarana berkaitan dengan kesiapan sarana dan prasarana Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan kepada Pemangku Kepentingan. Dengan ditingkatkannya kualitas sarana dan prasarana kerja diharapkan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang tersedia.

Kualitas sumber daya aparatur berkaitan erat dengan penilaian anggota DPRD terhadap Sekretariat DPRD. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur merupakan Amanah RPJMD 2025-2029

Provinsi Sumatera Barat. Peningkatan kualitas tidak hanya dari segi Pendidikan namun juga pada sektor pelayanan, sehingga sumber daya yang berkualitas adalah sumber daya aparatur yang melayani.

6. Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan rapat, pembuatan risalah dan mendokumentasi hasil kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD.

Fasilitas penyelenggaraan rapat, risalah, dan dokumentasi merupakan kompilasi dari sarana dan prasarana dengan sumber daya aparatur yang melayani. Dalam hal fasilitasi diharuskan untuk memberikan pelayanan prima mengingat DPRD selalu memaksimalkan waktu dalam kantor dan luar kantor.

7. Meningkatkan ketersediaan layanan informasi dan Infrastruktur database dengan meningkatkan peran serta admin dalam layanan informasi melalui IT.

Ketersediaan layanan informasi dan infrastruktur database merupakan inovasi Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan kepada pemangku kepentingan. Di antaranya adalah membangun aplikasi aspirasi dan berita untuk masyarakat.

8. Meningkatkan pengembangan fungsi kepastakaan, dengan memaksimalkan aset yang ada.

Peningkatan fungsi kepastakaan merupakan amanat undang-undang. Hal ini bertujuan untuk memperluas informasi kepada masyarakat melalui giat membacara. Adapun Sekretariat DPRD sudah memiliki perpustakaan yang didukung oleh fungsional Pustakawan dan sarana dan prasarana yang sangat baik.

9. Meningkatkan penyelenggaraan dan mengirimkan peserta pendidikan dan pelatihan pegawai.

Peningkatan aparatur khusus perlu dilaksanakan sehingga aparatur tersebut bisa memberikan pelayanan yang sesuai standar. Komitmen ini ditetapkan lebih banyak diterapkan karena kesalahan prosedur yang seringkali tidak sesuai standar. Seperti contohnya adalah pelaksanaan pelayanan keprotokolan yang sering diabaikan akibat tidak tersedianya aparatur yang memiliki standar tersebut.

### **3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029**

Kebijakan pada dasarnya adalah merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan atau melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya tujuan dan strategis dalam mewujudkan sasaran, serta visi dan misi organisasi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat disusun sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.

Arah kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi dan Koordinasi dengan Anggota DPRD secara berkesinambungan
2. Fasilitasi keuangan dan kesejahteraan DPRD
3. Fasilitasi Administrasi DPRD
4. Fasilitasi Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
5. Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran
6. Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
7. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD
8. Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
9. Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
10. Fasilitasi Pembahasan Kerjasama Daerah
11. Fasilitasi Tugas DPRD
12. Penerapan reward dan punishman untuk melahirkan Aparatur Sipil Negara yang inovatif, kreatif berkarakter dan melayani.

Seluruh arah kebijakan tersebut terakomodir ke dalam Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-

3807 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan ditetapkannya arah kebijakan di atas, maka Sekretariat DPRD berkomitmen untuk selalu berpegang dengan aturan di atasnya.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat merumuskan kegiatan-kegiatan prioritas tahunan dengan penahapan sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Penahapan Renstra Sekretariat DPRD**

<b>Tahap I</b>	<b>Tahap II</b>	<b>Tahap III</b>	<b>Tahap IV</b>	<b>Tahap V</b>
Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan
Pemenuhan	Pemenuhan	Pemenuhan	Pemenuhan	Pemenuhan
Standar	Standar	Standar	Standar	Standar
Pelayanan	Pelayanan	Pelayanan	Pelayanan	Pelayanan
Minimal (SPM)	Minimal (SPM)	Minimal (SPM)	Minimal (SPM)	Minimal (SPM)
bagi Anggota	bagi Anggota	bagi Anggota	bagi Anggota	bagi Anggota
DPRD	DPRD	DPRD	DPRD	DPRD

Berdasarkan tabel di atas tentang penahapan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat setiap tahapnya atau setiap tahun selalu difokuskan kepada pencapaian maksimal untuk kegiatan-kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi Pemangku Kepentingan yaitu Anggota DPRD dan Masyarakat.

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra perangkat daerah perlu disusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program, kegiatan dan sub kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317- 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, adalah:

#### **I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
  - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Perangkat Daerah.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - a. Pengamanan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
  - b. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - c. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah
  - i. Penatausahaan Arsip Dinamis pada Perangkat Daerah
  - j. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Pengadaan Mebel
  - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - d. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - c. Pemeliharaan Mebel
  - d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
  - a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
  - b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
  - c. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
10. Layanan Administrasi DPRD
  - a. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
  - b. Fasilitasi Fraksi DPRD
  - c. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
  - d. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

## **II. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**

1. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
  - a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
  - b. Pembahasan Rancangan Perda
  - c. Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan
  - d. Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik
  - e. Penyusunan Tata Tertib DPRD
  - f. Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
  - a. Pembahasan KUA dan PPAS
  - b. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
  - c. Pembahasan APBD
  - d. Pembahasan Perubahan APBD
  - e. Pembahasan Laporan Semester
  - f. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
  - a. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
  - b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
  - c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
  - d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
  - e. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
  - f. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
  - g. Pengawasan Penggunaan Anggaran
  - h. Pengawasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
4. Peningkatan Kapasitas DPRD
  - a. Orientasi DPRD
  - b. Pendalaman Tugas

- c. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
  - d. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
  - e. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
  - f. Penyusunan Program Kerja DPRD
  - g. Publikasi dan Dokumentasi DPRD
5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
    - a. Kunjungan Kerja Dalam Daerah
    - b. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
    - c. Pelaksanaan Reses
    - d. Sosialisasi Rancangan Perauran Daerah
  6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik
    - a. Penyusunan Kode Etik
    - b. Pengawasan Kode Etik
  7. Pembahasan Kerjasama Daerah
    - a. Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah
    - b. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
  8. Fasilitasi Tugas DPRD
    - a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
    - b. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
    - c. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
    - d. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
    - e. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus

Penetapan indikator kinerja program bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian kinerja program yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD tercapai.

Terdapat implikasi yang akan mempengaruhi target dan kinerja yang ditetapkan apabila program dan kegiatan tersebut tidak dijalankan dengan baik. Implikasi pertama adalah terkait dengan pelaksanaan tugas dan

fungsi anggota DPRD sendiri. Mengingat Sekretariat DPRD merupakan organisasi perangkat daerah yang bertugas melayani kebutuhan anggota DPRD dalam menjalankan aktivitas kedewanan, maka sudah tentu akan memberikan dampak yang buruk apabila program dan kegiatan tidak dijalankan dengan baik seperti gagalnya pelaksanaan rapat-rapat yang berdampak ke dalam pelaksanaan rapat. Hal tersebut berdampak global ke pemerintahan provinsi Sumatera Barat sehingga program dan kegiatan tersebut harus dijalankan dengan baik. Program/ Kegiatan/ Subkegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tertuang pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program dan Kegiatan	Ket	
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Kinerja Keuangan Daerah	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH PROVINSI		
				Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi				
				Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Persentase tertib administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
		Persentase tertib administrasi BMD	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program dan Kegiatan	Ket
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Adiministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, Sosialisasi dll	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program dan Kegiatan	Ket
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Persentase ketersediaan BMD sesuai dengan perencanaan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Baru	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program dan Kegiatan	Ket
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase BMD dalam kondisi baik		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
					Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program dan Kegiatan	Ket		
				Persentase Layanan Administrasi DPRD		Layanan Administrasi DPRD			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Fasilitasi Fraksi DPRD				
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD				
	Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
				Persentase Penetapan Ranperda Tahun N					
				Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah					
			Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang Difasilitasi		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD			
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Pembahasan Rancangan Perda	
							Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	
							Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Penyusunan Tata Tertib DPRD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program dan Kegiatan	Ket
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	
				Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang Difasilitasi		Pembahasan Kebijakan Anggaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Pembahasan KUA dan PPAS	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Pembahasan APBD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Pembahasan Perubahan APBD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Pembahasan Laporan Semester	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	
				Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang difasilitasi		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program dan Kegiatan	Ket
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pengawasan Penggunaan Anggaran	
					Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	
				Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD yang difasilitasi		Peningkatan Kapasitas DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Orientasi DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD	
					Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	
					Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Penyusunan Program Kerja DPRD	
					Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	
				Persentase Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang difasilitasi		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
					Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Kunjungan Kerja dalam Daerah	
					Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program dan Kegiatan	Ket
					Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Pelaksanaan Reses	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	
				Persentase Pelaksanaan Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	
					Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Penyusunan Kode Etik DPRD	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Pengawasan Kode Etik DPRD	
				Persentase Kerjasama Daerah yang difasilitasi		Pembahasan Kerjasama Daerah	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang disusun	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	
				Persentase Pelaksanaan Fasilitasi untuk Pimpinan dan Alat Kelengkapan Kedewanan		Fasiitasi Tugas DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	
					Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	

**Tabel 4.2**  
**Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD**

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator outcome/ output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
<b>Bidang Urusan Sekretariat DPRD</b>			<b>163.471.575.135</b>		<b>150.678.701.013</b>		<b>149.169.655.879</b>		<b>147.608.976.301</b>		<b>148.927.495.909</b>		<b>149.984.531.946</b>		
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH PROVINSI</b>	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	100%	97.678.376.526	100%	99.857.127.906	100%	101.354.984.824	100%	102.875.309.596	100%	104.418.439.240	100%	105.984.715.830	
	Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%	85%	285.193.900	85%	306.675.000	85%	338.577.654	85%	344.541.268	85%	360.882.230	85%	362.261.388	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	109.480.900	6 Dokumen	104.915.000	6 Dokumen	115.829.052	6 Dokumen	117.869.233	6 Dokumen	123.459.555	6 Dokumen	123.931.372	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	55.988.000	3 Laporan	65.880.000	3 Laporan	72.733.336	3 Laporan	74.014.441	3 Laporan	77.524.810	3 Laporan	77.821.081	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	119.725.000	4 Laporan	135.880.000	4 Laporan	150.015.266	4 Laporan	152.657.594	4 Laporan	159.897.865	4 Laporan	160.508.935	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	100%	100%	13.533.954.734	100%	14.590.907.664	100%	15.031.040.303	100%	15.295.792.962	100%	16.021.244.530	100%	16.082.471.803	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/ Bulan	89 Orang/ Bulan	12.431.503.234	89 Orang/ Bulan	13.509.225.164	89 Orang/ Bulan	13.836.832.998	89 Orang/ Bulan	14.080.551.215	89 Orang/ Bulan	14.748.366.084	89 Orang/ Bulan	14.804.728.887	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10000 Dokumen	10000 Dokumen	979.842.500	10000 Dokumen	971.882.500	10000 Dokumen	1.072.985.078	10000 Dokumen	1.091.884.345	10000 Dokumen	1.143.670.428	10000 Dokumen	1.148.041.113	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	122.609.000	12 Laporan	109.800.000	12 Laporan	121.222.227	12 Laporan	123.357.402	12 Laporan	129.208.018	12 Laporan	129.701.803	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator outcome/ output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tertib administrasi BMD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>521.406.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.033.702.000</b>	<b>100%</b>	<b>642.439.510</b>	<b>100%</b>	<b>653.755.263</b>	<b>100%</b>	<b>684.761.682</b>	<b>100%</b>	<b>687.378.587</b>	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Laporan	12 Laporan	498.796.000	12 Laporan	997.592.000	12 Laporan	602.573.075	12 Laporan	613.186.633	12 Laporan	642.268.956	12 Laporan	644.723.470	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	22.610.000	12 Laporan	22.610.000	12 Laporan	24.962.063	12 Laporan	25.401.737	12 Laporan	26.606.495	12 Laporan	26.708.175	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	13.500.000	12 Dokumen	14.904.372	12 Dokumen	15.166.893	12 Dokumen	15.886.231	12 Dokumen	15.946.942	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>111.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>122.547.060</b>	<b>100%</b>	<b>124.705.570</b>	<b>100%</b>	<b>130.620.127</b>	<b>100%</b>	<b>131.119.308</b>	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	199 Stel	199 Stel	0	199 Stel	111.000.000	199 Stel	122.547.060	199 Stel	124.705.570	199 Stel	130.620.127	199 Stel	131.119.308	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, Sosialisasi dll	10 Orang		0		0		0		0		0		0	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>6.805.217.664</b>	<b>100%</b>	<b>9.745.143.976</b>	<b>100%</b>	<b>8.888.233.617</b>	<b>100%</b>	<b>9.044.788.543</b>	<b>100%</b>	<b>9.473.766.367</b>	<b>100%</b>	<b>9.509.971.596</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	90.697.000	20 Paket	90.697.000	20 Paket	100.131.988	20 Paket	101.895.685	20 Paket	106.728.411	20 Paket	107.136.287	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	99.800.000	5 Paket	99.800.000	5 Paket	110.181.951	5 Paket	112.122.665	5 Paket	117.440.438	5 Paket	117.889.251	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	770.287.582	7 Paket	1.540.575.164	7 Paket	930.549.878	7 Paket	946.940.330	7 Paket	991.851.983	7 Paket	995.642.474	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	85 Paket	85 Paket	1.100.386.456	85 Paket	2.200.772.912	85 Paket	1.329.327.522	85 Paket	1.352.741.935	85 Paket	1.416.900.018	85 Paket	1.422.314.886	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	518.036.500	20 Paket	518.036.500	20 Paket	571.926.580	20 Paket	582.000.339	20 Paket	609.603.553	20 Paket	611.933.232	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	22 Dokumen	22 Dokumen	250.000.000	22 Dokumen	250.000.000	22 Dokumen	276.006.893	22 Dokumen	280.868.403	22 Dokumen	294.189.479	22 Dokumen	295.313.762	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1280 Laporan	1280 Laporan	1.476.100.000	1280 Laporan	1.476.100.000	1280 Laporan	1.629.655.101	1280 Laporan	1.658.359.403	1280 Laporan	1.737.012.365	1280 Laporan	1.743.650.584	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator outcome/ output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2400 Laporan	2400 Laporan	1.809.763.326	2400 Laporan	2.837.822.400	2400 Laporan	3.133.034.179	2400 Laporan	3.188.218.591	2400 Laporan	3.339.429.985	2400 Laporan	3.352.192.052	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	625 Dokumen	625 Dokumen	46.646.800	625 Dokumen	87.840.000	625 Dokumen	96.977.782	625 Dokumen	98.685.922	625 Dokumen	103.366.415	625 Dokumen	103.761.443	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	643.500.000	2 Dokumen	643.500.000	2 Dokumen	710.441.743	2 Dokumen	722.955.270	2 Dokumen	757.243.720	2 Dokumen	760.137.625	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan BMD sesuai dengan perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>6.649.180.635</b>	<b>100%</b>	<b>3.412.583.235</b>	<b>100%</b>	<b>3.325.974.959</b>	<b>100%</b>	<b>3.384.557.777</b>	<b>100%</b>	<b>5.045.081.179</b>	<b>100%</b>	<b>3.558.629.167</b>	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Baru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Baru	1 Unit	1 Unit	3.636.739.000							4 Unit	1.500.000.000			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-		1 Unit	400.000.000									
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	1.010.025.056	15 Paket	1.010.025.056	15 Paket	1.115.095.512	15 Paket	1.134.736.501	15 Paket	1.188.554.984	15 Paket	1.193.097.201	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	1.300.365.000	10 Unit	1.300.365.000	10 Unit	1.435.638.816	10 Unit	1.460.925.768	10 Unit	1.530.214.813	10 Unit	1.536.062.728	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	74.858.400	1 Unit	75.000.000	1 Unit	82.802.068	1 Unit	84.260.521	1 Unit	88.256.843	1 Unit	88.594.128	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	191.907.900	2 Unit	191.907.900	2 Unit	211.871.613	2 Unit	215.603.462	2 Unit	225.829.141	2 Unit	226.692.176	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	435.285.279	1 Unit	435.285.279	1 Unit	480.566.950	1 Unit	489.031.525	1 Unit	512.225.398	1 Unit	514.182.934	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>16.702.005.868</b>	<b>100%</b>	<b>17.268.821.306</b>	<b>100%</b>	<b>19.065.254.890</b>	<b>100%</b>	<b>19.401.065.108</b>	<b>100%</b>	<b>20.321.222.248</b>	<b>100%</b>	<b>20.398.882.445</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	113.126.000	12 Laporan	113.126.000	12 Laporan	124.894.223	12 Laporan	127.094.075	12 Laporan	133.121.915	12 Laporan	133.630.657	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.861.841.840	12 Laporan	2.861.841.840	12 Laporan	3.159.552.303	12 Laporan	3.215.203.798	12 Laporan	3.367.695.051	12 Laporan	3.380.565.136	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator outcome/ output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan	20 Laporan	1.697.772.216	20 Laporan	1.697.772.216	20 Laporan	1.874.387.340	20 Laporan	1.907.402.289	20 Laporan	1.997.866.901	20 Laporan	2.005.502.009	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	12.029.265.812	13 Laporan	12.596.081.250	13 Laporan	13.906.421.024	13 Laporan	14.151.364.946	13 Laporan	14.822.538.381	13 Laporan	14.879.184.643	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase BMD dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>9.064.355.325</b>	<b>100%</b>	<b>9.270.855.325</b>	<b>100%</b>	<b>8.739.157.191</b>	<b>100%</b>	<b>8.526.640.644</b>	<b>100%</b>	<b>5.285.341.605</b>	<b>100%</b>	<b>7.262.332.284</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit	149.500.000	7 Unit	149.500.000	7 Unit	165.052.122	7 Unit	167.959.305	7 Unit	175.925.308	7 Unit	176.597.629	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 Unit	57 Unit	998.700.000	57 Unit	998.700.000	57 Unit	1.102.592.338	57 Unit	1.122.013.099	57 Unit	1.175.228.134	57 Unit	1.179.719.421	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	60 Unit	60 Unit	206.500.000	60 Unit	413.000.000	60 Unit	249.463.388	60 Unit	253.857.368	60 Unit	265.897.360	60 Unit	266.913.521	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit	110 Unit	168.040.000	110 Unit	168.040.000	110 Unit	185.520.793	110 Unit	188.788.505	110 Unit	197.742.399	110 Unit	198.498.097	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	3.911.364.228	1 Unit	3.911.364.228	1 Unit	3.028.631.239	1 Unit	2.715.531.042	1 Unit	1.198.621.673	1 Unit	1.703.202.361	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	2.257.551.996	1 Unit	2.257.551.996	1 Unit	2.492.399.653	1 Unit	2.536.300.103	1 Unit	1.656.592.192	1 Unit	2.162.923.077	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	1.372.699.101	2 Unit	1.372.699.101	2 Unit	1.515.497.658	2 Unit	1.542.191.222	2 Unit	615.334.539	2 Unit	1.574.478.178	
<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>43.398.996.600</b>	<b>100%</b>	<b>43.398.996.600</b>	<b>100%</b>	<b>44.408.578.958</b>	<b>100%</b>	<b>45.292.310.888</b>	<b>100%</b>	<b>46.250.085.950</b>	<b>100%</b>	<b>47.143.004.980</b>	
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	65 Orang/ Bulan	65 Orang/ Bulan	41.713.806.600	65 Orang/ Bulan	41.713.806.600	65 Orang/ Bulan	42.548.082.732	65 Orang/ Bulan	43.399.044.388	65 Orang/ Bulan	44.267.025.273	65 Orang/ Bulan	45.152.365.779	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 -2029  
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator outcome/ output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyediaan Pakiaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakiaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	65 Paket	65 Paket	1.486.940.000	65 Paket	1.486.940.000	65 Paket	1.641.622.760	65 Paket	1.670.537.857	65 Paket	1.749.768.421	65 Paket	1.756.455.389	
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	65 Orang	65 Orang	198.250.000	65 Orang	198.250.000	65 Orang	218.873.466	65 Orang	222.728.643	65 Orang	233.292.256	65 Orang	234.183.812	
<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>718.065.800</b>	<b>100%</b>	<b>718.442.800</b>	<b>100%</b>	<b>793.180.682</b>	<b>100%</b>	<b>807.151.573</b>	<b>100%</b>	<b>845.433.322</b>	<b>100%</b>	<b>848.664.272</b>	
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	65 Dokumen	65 Dokumen	16.093.000	65 Dokumen	16.470.000	65 Dokumen	18.183.334	65 Dokumen	18.503.610	65 Dokumen	19.381.202	65 Dokumen	19.455.269	
Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	7 Laporan	7 Laporan	95.160.000	7 Laporan	95.160.000	7 Laporan	105.059.263	7 Laporan	106.909.748	7 Laporan	111.980.282	7 Laporan	112.408.229	
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	24 Laporan	24 Laporan	143.400.000	24 Laporan	143.400.000	24 Laporan	158.317.554	24 Laporan	161.106.116	24 Laporan	168.747.085	24 Laporan	169.391.973	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	463.412.800	12 Paket	463.412.800	12 Paket	511.620.531	12 Paket	520.632.099	12 Paket	545.324.753	12 Paket	547.408.801	
<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N</b>	<b>Tepat</b>	<b>Tepat</b>	<b>65.793.198.609</b>	<b>Tepat</b>	<b>50.821.573.107</b>	<b>Tepat</b>	<b>47.814.671.055</b>	<b>Tepat</b>	<b>44.733.666.705</b>	<b>Tepat</b>	<b>44.509.056.669</b>	<b>Tepat</b>	<b>43.999.816.116</b>	
	<b>Persentase Penetapan Ranperda Tahun N</b>	<b>60</b>	<b>60</b>		<b>62</b>		<b>65</b>		<b>68</b>		<b>70</b>		<b>75</b>		
	<b>Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		
<b>Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD</b>	<b>Persentase Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang Difasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>25.321.681.600</b>	<b>100%</b>	<b>8.254.729.866</b>	<b>100%</b>	<b>8.608.800.064</b>	<b>100%</b>	<b>7.649.865.934</b>	<b>100%</b>	<b>7.749.153.651</b>	<b>100%</b>	<b>8.003.248.583</b>	
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	805.672.200	1 Dokumen	1.473.531.200	1 Dokumen	1.587.817.215	1 Dokumen	1.595.391.470	1 Dokumen	1.672.946.517	1 Dokumen	1.671.311.600	
Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	17 Dokumen	17 Dokumen	5.134.110.000	17 Dokumen	5.191.363.766	17 Dokumen	4.594.002.127	17 Dokumen	3.615.916.517	17 Dokumen	3.519.106.225	17 Dokumen	3.777.335.067	
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	6 Dokumen	6 Dokumen	190.896.000	6 Dokumen	367.167.000	6 Dokumen	395.644.202	6 Dokumen	397.531.511	6 Dokumen	416.856.277	6 Dokumen	416.448.893	

**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 -2029**  
**SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator outcome/ output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Facilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	6 Dokumen	6 Dokumen	281.958.000	6 Dokumen	352.746.000	6 Dokumen	380.104.720	6 Dokumen	381.917.902	6 Dokumen	400.483.661	6 Dokumen	400.092.278	
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	414.589.400	1 Dokumen	819.921.900	1 Dokumen	883.514.440	1 Dokumen	887.728.996	1 Dokumen	930.883.199	1 Dokumen	929.973.470	
Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	6500 Orang	6500 Orang	18.494.456.000	6500 Orang	50.000.000	6500 Orang	767.717.360	6500 Orang	771.379.538	6500 Orang	808.877.772	6500 Orang	808.087.275	
<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang Difasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>4.095.912.500</b>	<b>100%</b>	<b>4.095.912.500</b>	<b>100%</b>	<b>4.413.588.462</b>	<b>100%</b>	<b>4.434.642.239</b>	<b>100%</b>	<b>4.340.819.858</b>	<b>100%</b>	<b>4.633.785.554</b>	
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	890.046.500	1 Dokumen	890.046.500	1 Dokumen	959.077.852	1 Dokumen	963.652.862	1 Dokumen	701.099.053	1 Dokumen	997.621.760	
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	590.640.200	1 Dokumen	590.640.200	1 Dokumen	636.449.820	1 Dokumen	639.485.824	1 Dokumen	670.572.452	1 Dokumen	669.917.118	
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	838.583.300	1 Dokumen	838.583.300	1 Dokumen	903.623.204	1 Dokumen	907.933.683	1 Dokumen	952.070.075	1 Dokumen	951.139.640	
Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	864.016.700	1 Dokumen	864.016.700	1 Dokumen	931.029.200	1 Dokumen	935.470.412	1 Dokumen	980.945.417	1 Dokumen	979.986.763	
Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	1 Dokumen	89.031.700	1 Dokumen	89.031.700	1 Dokumen	95.936.933	1 Dokumen	96.394.573	1 Dokumen	101.080.497	1 Dokumen	100.981.713	
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	823.594.100	1 Dokumen	823.594.100	1 Dokumen	887.471.453	1 Dokumen	891.704.885	1 Dokumen	935.052.364	1 Dokumen	934.138.560	
<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang difasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>5.146.747.024</b>	<b>100%</b>	<b>5.146.747.024</b>	<b>100%</b>	<b>5.545.924.938</b>	<b>100%</b>	<b>5.572.380.203</b>	<b>100%</b>	<b>5.843.264.253</b>	<b>100%</b>	<b>5.837.553.773</b>	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3 Laporan	3 Laporan	763.154.300	3 Laporan	763.154.300	3 Laporan	822.343.986	3 Laporan	826.266.745	3 Laporan	866.433.151	3 Laporan	865.586.407	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3 Laporan	3 Laporan	846.078.000	3 Laporan	846.078.000	3 Laporan	911.699.188	3 Laporan	916.048.191	3 Laporan	960.579.044	3 Laporan	959.640.294	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator outcome/ output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3 Laporan	3 Laporan	828.803.900	3 Laporan	828.803.900	3 Laporan	893.085.321	3 Laporan	897.345.532	3 Laporan	940.967.213	3 Laporan	940.047.629	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3 Laporan	3 Laporan	847.552.800	3 Laporan	847.552.800	3 Laporan	913.288.372	3 Laporan	917.644.956	3 Laporan	962.253.431	3 Laporan	961.313.044	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3 Laporan	3 Laporan	827.350.200	3 Laporan	827.350.200	3 Laporan	891.518.873	3 Laporan	895.771.612	3 Laporan	939.316.782	3 Laporan	938.398.811	
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 Dokumen	2 Dokumen	301.148.000	2 Dokumen	301.148.000	2 Dokumen	324.504.817	2 Dokumen	326.052.775	2 Dokumen	341.902.823	2 Dokumen	341.568.689	
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	201.891.800	1 Dokumen	201.891.800	1 Dokumen	217.550.379	1 Dokumen	218.588.141	1 Dokumen	229.214.128	1 Dokumen	228.990.122	
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	530.768.024	1 Dokumen	530.768.024	1 Dokumen	571.934.002	1 Dokumen	574.662.251	1 Dokumen	602.597.681	1 Dokumen	602.008.777	
<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD yang difasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>9.389.109.884</b>	<b>100%</b>	<b>8.494.165.844</b>	<b>100%</b>	<b>5.964.834.732</b>	<b>100%</b>	<b>5.985.364.102</b>	<b>100%</b>	<b>6.146.959.050</b>	<b>100%</b>	<b>6.143.552.483</b>	
Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	3 Dokumen	-	0	-	0	-	0	-	0	1 Dokumen	958.000.000	-	0	
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	48 Dokumen	48 Dokumen	1.911.464.024	48 Dokumen	1.911.464.024	48 Dokumen	1.059.715.769	48 Dokumen	1.064.770.844	48 Dokumen	1.116.531.390	48 Dokumen	1.115.440.231	
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	30 Orang	30 Orang	2.093.680.600	30 Orang	2.093.680.600	30 Orang	1.110.632.600	30 Orang	2.110.632.600	30 Orang	1.152.632.600	30 Orang	2.110.632.600	
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	7 Orang	550.547.300	7 Orang	550.547.300	7 Orang	550.547.300	7 Orang	550.547.300	7 Orang	550.547.300	7 Orang	550.547.300	
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	299.097.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	2 Dokumen	2 Dokumen	226.996.960	2 Dokumen	428.473.920	2 Dokumen	461.706.042	2 Dokumen	463.908.480	2 Dokumen	486.459.958	2 Dokumen	485.984.552	
Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	452 Dokumen	452 Dokumen	4.307.324.000	452 Dokumen	3.510.000.000	452 Dokumen	2.782.233.021	452 Dokumen	1.795.504.878	452 Dokumen	1.882.787.802	452 Dokumen	1.880.947.800	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator outcome/ output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang difasilitasi</b>	100%	100%	12.784.448.852	100%	15.444.145.430	100%	13.167.689.047	100%	11.575.956.427	100%	11.248.485.075	100%	10.707.412.865	
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	390 Laporan	390 Laporan	106.970.000	390 Laporan	200.120.000	390 Laporan	215.641.160	390 Laporan	216.669.815	390 Laporan	227.202.548	390 Laporan	226.980.508	
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	65 Dokumen	65 Dokumen	112.992.100	65 Dokumen	200.724.100	65 Dokumen	216.292.113	65 Dokumen	217.323.873	65 Dokumen	227.888.401	65 Dokumen	227.665.691	
Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	195 Dokumen	195 Dokumen	12.564.486.752	195 Dokumen	6.372.334.000	195 Dokumen	5.392.274.587	195 Dokumen	5.417.996.911	195 Dokumen	5.681.376.099	195 Dokumen	5.675.823.831	
Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	6500 Orang	6500 Orang	8.670.967.330	6500 Orang	8.670.967.330	6500 Orang	7.343.481.187	6500 Orang	5.723.965.828	6500 Orang	5.112.018.027	6500 Orang	4.576.942.835	
<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik</b>	100%	100%	393.407.906	100%	723.981.600	100%	780.133.080	100%	783.854.484	100%	821.959.148	100%	821.155.867	
Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	2 Dokumen	2 Dokumen	289.511.386	2 Dokumen	548.669.800	2 Dokumen	591.224.226	2 Dokumen	594.044.494	2 Dokumen	622.922.132	2 Dokumen	622.313.365	
Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 Laporan	3 Laporan	103.896.520	3 Laporan	175.311.800	3 Laporan	188.908.854	3 Laporan	189.809.990	3 Laporan	199.037.016	3 Laporan	198.842.502	
<b>Pembahasan Kerjasama Daerah</b>	<b>Persentase Kerjasama Daerah yang difasilitasi</b>	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang disusun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Fasilitasi untuk Pimpinan dan Alat Kelengkapan Kedewan</b>	100%	100%	8.661.890.843	100%	8.661.890.843	100%	9.333.700.732	100%	8.731.603.316	100%	8.358.415.634	100%	7.853.106.991	
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	24 Dokumen	24 Dokumen	3.297.531.024	24 Dokumen	3.297.531.024	24 Dokumen	3.553.285.108	24 Dokumen	2.923.613.853	24 Dokumen	2.268.088.701	24 Dokumen	1.768.731.984	
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	95.546.090	1 Laporan	95.546.090	1 Laporan	102.956.574	1 Laporan	103.447.699	1 Laporan	108.476.489	1 Laporan	108.370.477	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	10 Dokumen	10 Dokumen	1.108.628.509	10 Dokumen	1.108.628.509	10 Dokumen	1.194.612.921	10 Dokumen	1.200.311.484	10 Dokumen	1.258.660.920	10 Dokumen	1.257.430.862	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator outcome/ output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	36 Dokumen	36 Dokumen	2.549.928.000	36 Dokumen	2.549.928.000	36 Dokumen	2.747.698.542	36 Dokumen	2.760.805.662	36 Dokumen	2.895.013.703	36 Dokumen	2.892.184.478	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	3 Dokumen	3 Dokumen	1.610.257.220	3 Dokumen	1.610.257.220	3 Dokumen	1.735.147.587	3 Dokumen	1.743.424.618	3 Dokumen	1.828.175.821	3 Dokumen	1.826.389.190	

Berdasarkan data table di atas terlihat secara operasional, tujuan dan sasaran diwujudkan dalam program dan kegiatan OPD. Hal ini berarti bahwa seluruh program dan kegiatan harus bisa mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dan dengan adanya perubahan nomenklatur dalam penyusunan program dan kegiatan, kini mengacu kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dimana terdapat perubahan nama program dan kegiatan dari Renstra periode sebelumnya. Maka perumusan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 disesuaikan kembali melalui proses mapping program dan kegiatan kedalam nomenklatur yang baru.

Dari Program/ Kegiatan di atas terdapat program prioritas dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, yang tertuang pada tabel berikut :

**Tabel 4.3**  
**Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

Program dan Kegiatan	Outcome	Output	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang Difasilitasi	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	
			Pembahasan Rancangan Perda	
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	
			Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	
			Penyusunan Tata Tertib DPRD	
			Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	
		Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD yang difasilitasi	Peningkatan Kapasitas DPRD	
		Orientasi DPRD		

Program dan Kegiatan	Outcome	Output	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket		
			Pendalaman Tugas DPRD			
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			
			Penyusunan Program Kerja DPRD			
			Publikasi dan Dokumentasi DPRD			
			Persentase Pelaksanaan Fasilitasi untuk Pimpinan dan Alat Kelengkapan Kedewanan	Fasilitasi Tugas DPRD		
				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		
				Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		
				Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus		
			Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang Difasilitasi	Pembahasan Kebijakan Anggaran	
					Pembahasan KUA dan PPAS	
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					
	Pembahasan APBD					
	Pembahasan Perubahan APBD					
	Pembahasan Laporan Semester					
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD					
	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang difasilitasi	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum						
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur						
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat						

Program dan Kegiatan	Outcome	Output	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	
			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	
			Pengawasan Penggunaan Anggaran	
			Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	
		Persentase Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang difasilitasi	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
			Kunjungan Kerja dalam Daerah	
			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
			Pelaksanaan Reses	
			Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	
		Persentase Pelaksanaan Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	
			Penyusunan Kode Etik DPRD	
			Pengawasan Kode Etik DPRD	

Untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, telah dilaksanakan beberapa kali revisi dan menghasilkan sasaran dan tujuan yang lebih spesifik, adapun indikator kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat adalah Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan

Dari uraian yang disampaikan di atas dapat dilihat Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Sekretariat DPRD seperti tersebut di bawah ini yang mencantumkan tugas pokok, fungsi, tujuan, sasaran dan indikator Kinerja sebagai berikut pada halaman berikut:

**Tabel 4.4**  
**Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat**

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai	91,34	91,35	91,36	91,37	91,38	91,40	

**Tabel 4.5**  
**Indikator Kinerja Kunci Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat**

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat/ Tidak Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
2.	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persen	60	62	65	68	70	75
3.	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	100	100	100	100	100	100

Pencapaian indikator kinerja Sekretariat DPRD tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka memberikan pelayanan terbaik terhadap pemangku kepentingan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas dilakukan berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam mewujudkan perencanaan strategis, yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya yang ada.

Pengelolaan bidang urusan sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019 dan pemutakhirannya, Sekretariat DPRD berkontribusi ke

dalam unsur pendukung urusan pemerintahan. Dengan demikian, Sekretariat DPRD sudah memiliki aturan yang jelas terkait pelaksanaan pelayanan bidang urusan. Sebagai contoh, pelayanan bidang urusan bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran, bertugas dalam hal pelaksanaan tugas DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi budgeting DPRD. Selanjutnya bagian perundang-undangan bertugas dalam pelaksanaan tugas DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi Peraturan Daerah. Adapun bagian umum dan keuangan bertugas dalam pelayanan seSretariat dan DPRD dalam hal infrastruktur, sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan administrasi keuangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat disusun sebagai pelaksanaan perencanaan berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan dokumen ini adalah untuk memberikan gambaran perencanaan dan rencana tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi Pemerintah Daerah. Pencapaian tersebut merupakan indikasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat disusun sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Perencanaan strategis dimaksudkan untuk memiliki beberapa fungsi penting yaitu;

- 1) Sebagai instrumen pengarah dan pengendali untuk penyusunan dokumen berikutnya
- 2) Instrumen kontrol perencanaan di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya Renstra ini akan menjadi kerangka dasar bagi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025-2029, serta untuk mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir. Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sebagai penutup, Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pegawai Sekretariat DPRD beserta *Stakeholder* dalam

membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi dan Misi Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029.

Demikianlah Rencana Strategis ini dibuat untuk dapat dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan.

Padang, Agustus 2025

Pt. Sekretaris DPRD  
Provinsi Sumatera Barat



**Drs. MAHRIZON, M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19680513 199512 1 005